



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI TAHUN 1439 H/ 2018 M DENGAN PANJA BPIH KEMENTERIAN
AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SENIN, 5 MARET 2018**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- :
Jenis Rapat : PANJA BPIH (TERTUTUP)
Hari, Tanggal : SENIN, 5 MARET 2018
Waktu : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : R. Rapat Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor
Ketua Rapat : Dr. H. Noor Achmad, MA.
Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, M.Si.
Acara : Pembahasan Komponen BPIH 1439 H/2018 M
Hadir :

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (Dr. H. NOOR ACHMAD, MA/F-PG):

**Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua dan Pimpinan Panja BPIH Kementerian Agama,
Yang terhormat teman-teman semuanya dan seluruh teman-teman Kementerian Agama,**

Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. Dan pada hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan komponen BPIH Tahun 2018 atau 1439 Hijriyah. Oleh karena itu marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bagi yang ingin panjang doanya silakan. Bagi yang ingin pendek silakan. Tapi kita baca Al-Fatihah.

Menurut laporan Sekretariat pada hari ini yang tanda tangan ada 10, hadir 7, ijin ada 2. Oleh karena itu kita anggap kuorum untuk mengambil keputusan Rapat BPIH ini dan kita nyatakan tertutup.

(RAPAT : SETUJU)

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan rapat pada hari ini agendanya adalah:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Pembahasan komponen BPIH,
3. Tanya-jawab,
4. Kesimpulan,
5. Penutup.

Apakah bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Ini sudah jam 20.00. Kira-kira kita rapat sampai jam berapa? Apakah bisa dilanjutkan pada malam ini atau bisa dilanjutkan besok? Hanya nanti saya mohon pamit. Saya diperintahkan oleh Pak Dirjen untuk ... karena akan ketemu dengan si embahnya Bu Sri. Kita sampai secukupnya.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Rapat Panja ini dilaksanakan dengan merujuk pada Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapatkan persetujuan DPR. Jadi ini penting sekali.

Oleh karena itu rapat pada malam hari ini sangat penting sebagai upaya untuk membahas komponen-komponen BPIH untuk mengambil keputusan atau persetujuannya berdasarkan prinsip keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan prinsip nirlaba. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Oleh karena itu nanti rapatnya supaya efektif, efisien dan kalau menurut Bahasa Pak Ketua itu focus. Seperti telah disebutkan bahwa rapat ini diselenggarakan sebagai kelanjutan dari Rapat Panja tanggal 5 Februari 2018 mengenai pembahasan komponen BPIH Tahun 2018. Pada Rapat Panja BPIH yang lalu telah dibahas mengenai usulan rasionalisasi *direct cost* sehingga diperoleh nilai *direct cost* sebesar rata-rata

Rp34.844.932,-. *Direct cost* BPIH ini turun sebesar rata-rata Rp45.380,- dengan rinciannya adalah biaya penerbangan sebesar rata-rata Rp26.241.231,-, akomodasi di Mekkah sebesar 910 Riyal atau setara dengan Rp3.248.700,-, *lifying cost* sebesar 1500 Riyal atau setara dengan Rp5.355.000,-.

Selanjutnya salah satu kesimpulan Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1439 Hijriyah mendesak BPIH Kementerian Agama agar melakukan negosiasi lebih lanjut ke perusahaan penyedia jasa penerbangan Haji untuk menurunkan biaya penerbangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka pada hari ini Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH ingin mendapatkan penjelasan dari Panja BPIH Kementerian Agama. Yang pertama, bagaimana hasil negosiasi Panja BPIH Kementerian Agama dengan pihak maskapai penerbangan. Yang kedua, bagaimana penjelasan mengenai rincian komponen BPIH yang lainnya.

Pak Ketua dan Pak Dirjen yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Dan perlu kami informasikan juga tadi siang juga kami sudah melakukan rapat. Ada 3 kesimpulan penting yaitu yang pertama, kalau bisa BPIH ini turun. Kalau tidak bisa tetap. Kalau toh terpaksa harus naik tidak lebih dari 5% atau diatas 2,5% atau kisaran yang 2,5%.

Oleh karena itu ini sedang kita garap. Oleh karena itu manakala nanti memang ini menjadi bagian penting dari persetujuan kita antara BPIH Kementerian Agama dengan TA, Komisi VIII akan melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai beberapa komponen-komponen yang memang betul-betul bisa diturunkan. Harapan kita, nanti tanggal 12 itu sudah diumumkan oleh Menteri Agama di Komisi VIII. Jadi nanti semua teman-teman Komisi VIII akan hadir, semua Pimpinan akan hadir. Dan nanti bersama-sama Menteri Agama mengumumkan BPIH pada tanggal 12 Maret yang akan datang. Jam 01.00 siang. Mengapa dipilih jam 01.00 siang? Karena nanti ada nasi kebuli. Kalau nasi kebuli itu dimakan pagi-pagi tidak begitu enak. Itu alasan jam 01.00 siang. Tetapi maksudnya adalah supaya pemberitaan itu sore langsung bisa dilaksanakan secara serentak oleh semua koran, televisi dan lain sebagainya.

Itu pengantar kami dan oleh karena itu kami persilakan kepada teman-teman Anggota Panja atau dari Pemerintah juga tidak apa-apa untuk menyampaikan dari beberapa hal dari pertanyaan-pertanyaan tadi khususnya yang terkait dengan negosiasi maskapai penerbangan dan beberapa komponen terutama sekali yang berhubungan dengan Pemandokan. Apakah memang sudah bisa dilakukan negosiasi. Kalau seandainya komponen penerbangan sudah beres. Artinya garuda tidak ... seperti kemarin. Kemarin itu Garuda agak terlalu tinggi. Makanya sekarang jujur saja, sedang kami share sedang kami sampaikan di koran agak supaya sedikit malu Garuda itu. Walaupun sebenarnya rasional apa yang disampaikan oleh Garuda.

Terima kasih.

Silakan.

DIRJEN PHU:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat malam,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Bapak Ketua Komisi VIII dan Pimpinan Panja BPIH DPR, dan Anggota Panja BPIH DPR RI yang saya hormati,

Teman-teman dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Republik Indonesia, Eselon II dan Eselon III bahkan ada Eselon IV.

Tentu yang pertama saya bersyukur karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa melaksanakan rapat yang sangat terhormat ini dalam rangka penetapan pembahasan BPIH Tahun 2018.

Langsung saja biar focus sesuai dengan bahan pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Yang pertama saya sampaikan bahwa hasil kronologi dari penawaran pertama pihak maskapai penerbangan itu di halaman 8, itu bisa dilihat bahwa pada tanggal 9 Februari diperoleh hasil penawaran dari maskapai penerbangan. Kalaupun dirata-rata itu adalah Rupiahnya adalah Rp27.970.249,-. Ini rata-rata. Jadi ada 1 sampai Nomor 9, mulai dari embarkasi Aceh sampai Lombok itu Garuda, lalu yang 10 sampai 13 ini adalah Saudi Arabia Airlines dan ternyata memang dari 2 maskapai ini memang Garuda memang lebih tinggi yaitu sekitar 28 Juta. Sementara Saudi itu sekitar 26. Jadi rata-ratanya diperoleh Rp27.970.249,-. Ini penawaran yang pertama. Kemudian pada tanggal 26 sampai 27 Februari ini ada. Tanggal 26 itu ada negosiasi antara kami dengan maskapai penerbangan. Kemudian diperoleh hasil itu rata-rata semuanya bisa menurunkan seluruh biaya maskapai per embarkasi itu sekitar 200.000. Sehingga diperoleh hasil yang semula penawarannya Rp27.970.249,- menjadi Rp27.785.035,-. Ini hasil negosiasi pertama.

Lalu pada tanggal 3 Maret setelah FGD dengan Komisi VIII terutama Pimpinan Panja, setelah itu kemudian diperoleh hasil dari negosiasi itu. Yang terakhir itu adalah turun lagi tapi tidak signifikan adalah rata-rata Rp27.671.612,-. Jadi sehingga kalau dibandingkan dengan selisih harga penerbangan dari 2017 dengan 2018 itu rata-rata naik Rp1.527.799,-. Ini atau sekitar 5,85%. Jadi ini memang masih apa yang tadi itu belum menjadi keinginan dari teman-teman Panja karena mintanya dibawah 5%. Jadi kemungkinan yang akan kita lakukan Inshaa Allah kami sudah janji untuk bisa menurunkan pada 2 komponen yang kemungkinan bisa. Yang pertama adalah dari Avtur dari Pertamina. Yang kedua ada dari Angkasa Pura. Kemudian kami sudah ada janji untuk negosiasi yang lebih sifatnya hampir final itu besok Kamis jam 13.00 supaya bisa diturunkan harga ini. Karena ini dampaknya kepada *direct cost*. Jadi kita undang Pertamina, kemudian Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, kemudian Pertamina dan kami dari Dirjen PHU. Sehingga nanti mungkin itu hasil akhir setelah kemungkinan besok teman-teman ini dari Pertamina, dari Garuda ikut disini jam 10.00. Kalau besok sudah bisa diberi kesepakatan untuk jauh lebih baik sehingga kita hanya memutuskan final pada hari Kamis. Tapi kalau mungkin masih dirasa kurang masih ada peluang kembali, besok Kamis akan kita lakukan negosiasi kembali dengan pihak Pertamina dan Angkasa Pura untuk mengurangi dari *direct cost* yang ini. Karena naiknya cukup signifikan 1,5 Juta dari tahun sebelumnya. ... Ini kan luar biasa disitu. Ini asumsi-asumsi yang beberapa komponen memang rasional tetapi ada kemungkinan kalau Avturnya ini bisa memperoleh diskon kemungkinan akan bisa turun juga karena implikasinya kepada harga pesawat penerbangan disitu. Sehingga kalau ini diperoleh terakhir ini. Posisi terakhir kalau harga penerbangannya itu Rp27.671.612,- maka di halaman 10 itu akan diperoleh hasil BPIH untuk *direct cost*, komponen penerbangannya ini Rp27.671.611,-. Kemudian akomodasi makan ini Rp3.294.000,-. Kemudian *living cost* Rp5.000.400,- maka akumulasi BPIH dari komponen *direct cost* ini adalah Rp36.365.611,-. Sehingga kenaikan *direct cost*-nya dari tahun kemarin itu menjadi Rp1.475.300,- atau dipresentasikan berapa Pak? 4,23% dari BPIH Tahun 2017. Kalau dengan skema seperti ini maka penggunaan *indirect cost* itu 6,2 Triliun yang tahun sebelumnya itu 5,48 Triliun. Sehingga kenaikan *indirect cost*-nya itu menjadi Rp778.550.736.286,-. Jadi itu hasil dari perhitungan kalau biaya penerbangan mencapai negosiasi yang 3 itu tadi. Masih ada peluang 2 negosiasi lagi, besok dan Kamis. Setelah itu mungkin mudah-mudahan 12 itu ... yang rasional menurut Ketua Komisi, kira-kira begitu. Selama ini kalau menggunakan ini kenaikan BPIH kemarin 4,3% dari BPIH tahun sebelumnya.

Saya rasa itu Pak Ketua, focus dan saya rasa singkat tapi kena menurut saya. Dan ini mohon masukan dari teman-teman yang terhormat Anggota Komisi VIII khususnya Panitia Panja DPR RI.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dirjen Ketua Panja BPIH Pemerintah.

Bapak/Ibu semuanya,

Sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa memang ada beberapa komponen di penerbangan yang tidak bisa diturunkan tapi masih akan diusahakan. Besok pagi itu Pertamina dan Angkasa Pura. Kalau Angkasa Pura itu tujuannya apa? Pajak ya.

DIRJEN PHU:

Sama *airport tax*, jasa kebandaraan, kemudian jasa navigasi penerbangan kan lumayan. Ini 569.000 sama Kalau bisa ditekan kan bisa ditekan naik.

KETUA RAPAT:

Memang kemarin saya tanya kepada Garuda. Salah satu kesalahannya dia tidak *aging* untuk Avtur. Sehingga fluktuasi ini dia mengikuti. Nah oleh karena itu nanti kalau bisa dibicarakan dengan Pertamina, kira-kira harga Avtur itu standarnya berapa. Itu mungkin bisa. Garuda itu kemarin, saya tanya waduh ini kita kemarin belum ... untuk Avturnya Pak. Mungkin bisa tahun depan. Nah maka dari itu begitu Dollar naik, fluktuatif dia juga ragu-ragu untuk bisa menurunkan lagi. Tetapi sekali lagi apa yang akan dilakukan Pak Dirjen bagus dengan mengundang Pertamina. Mudah-mudahan Pertamina juga bisa memberikan harga special bagi penerbangan Haji itu.

Saya kira itu. Kami mempersilakan kepada Bapak/Ibu semuanya untuk bisa mensikapi dan menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Dipersilakan Pak John.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Panja BPIH,
Yang saya hormati Pak Dirjen, Ketua Panja BPIH dari Pemerintah beserta seluruh
dengan jajarannya yang hadir pada malam hari ini.**

Terus terang Pak Dirjen, saya jadi gemeteran melihat angka yang kita pada tanggal 5 Februari 2018 yang lalu kita sudah berharap akan bisa dibawah Rp34.890.312,- bahkan sudah ketemu pada waktu itu oleh Pak Ramadhan. Angkanya 34.844.931,54. Pada malam hari ini Pak Dirjen menyampaikan kepada kami angka yang sudah ditemukan dengan kondisi-kondisi, alasan-alasan sebagaimana yang telah disampaikan yaitu menjadi 365.612 sehingga ada terjadi kenaikan biaya Haji sebesar Memang kenaikan ini sebagaimana yang disampaikan Pak Dirjen, sebagian besar adalah kenaikan daripada Avtur bahwa sebagaimana kita ketahui akhir-akhir ini memang harga minyak per barrel itu sudah sampai 65 Dollar per barrelnya. Yang biasanya stay di angka 50 Dollar per barrel sekarang sudah menjadi angka 65 Dollar per barrel. Bahwa

memang diperlukan karena saya bergembira dengan angka Rp34.890.312,- tambahkan kami sebagian ketika kami Reses kami sudah menyampaikan juga kepada konstituen. Walaupun ini sifatnya non formal ini hanya sementara waktu tetapi saya secara pribadi sudah menyiarkan angka Rp34.844.931,54 Walaupun tidak formal Pimpinan, mohon maaf. Kita kan kadang-kadang membesarkan hati konstituen untuk datang itu. Ya kita sampaikan Alhamdulillah pada tahun ini biaya naik Haji, wah semua bersorak-sorai menyambut tidak naik. Karena malam ini secara tidak terduga-duga angka itu menjadi Rp36.365.612,- yang disebabkan oleh 2 komponen Avtur dan Angkasa Pura pengelola bandara. Saya sangat masih berharap Pak Dirjen dan Pimpinan yang saya hormati, angka itu tetap. Angka BPIH itu tetap di angka Rp34.844.931,54 dan saya percaya kepada Pak Romadhan untuk bagaimana membuat simulasinya angka ini menjadi Rp34.844.931,54. Supaya apa? Beban yang telah kami sampaikan kepada konstituen kita, yah Pak Jhon bohong saja katanya kan ya. Tidak benar Pak Jhon nih katanya kan ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Kami mendukung saya secara pribadi maupun kawan-kawan yang lain saya pikir sependapat dengan saya.

Kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Dirjen, bagaimana angkanya itu dibawah Rp34.890.312,- minimal sama Pak Dirjen. Walaupun Rp5000,- turunnya kelihatannya turun Pak Dirjen. Bagaimana caranya dan saya yakin Pak Dirjen beserta staf yang sudah sangat berpengalaman bisa mencari jalan keluar terhadap konteks ini. Mari kita berdiskusi Pak Dirjen. Mungkin pos-pos mana yang harus kita kurangi sehingga angkanya itu tetap pada yang 5 Februari 2018 itu yang angka Rp34.844.931,54. Mungkin untuk sementara pemancing dulu suasana Pimpinan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

***Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Bisri.

F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLI, MM):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan Panja, Ketua dan Wakil Ketua, Anggota Komisi VIII, Panja Pemerintah dan jajarannya yang kami hormati,

Yang pertama melihat kalau draft dulu sebelum ini kan ... sekarang Sebetulnya ... itu dimana? Ya oke. Maksud kami ketika ... pengalaman. Ketika ... itu 13300 sampai 13500 menurut saya kan sesuai dengan APBN. Nah mestinya ... ini tidak usah dibolak balik.

Oleh karena itu sekali lagi kalau uangnya sudah ada kemudian ... juga 30 M. Dikatakan kalau 1500 ... (suara tidak jelas).

Oleh karena itu ... Riyal ini jangan diubah-ubah. Ini yang pertama.

Yang kedua, kenaikan dari 1 juta 400 lebih. Ini Pak Jhon mintanya agak naik Pak. Kalau saya kenaikannya kan ini kan 1. Kenaikan pesawat. Yang kedua, kalau dulu makanya Cuma kalau tidak salah 25. Ini kan 15. Ini menjadi 50. Ini kan berarti ada beda 15. Ya monggo. Kalau saya sebagai Panja kira-kira tidak terlalu banyak. Jujur saja Pak Jhon. Kalau murah itu kan kita bunga orang yang mau berangkat sudah dipakai Pak. Ini bukan APBN. Jujur, murah senang kan. Tapi ini kan sebetulnya tidak ada dusta diantara kita. Tidak Pak Jokowi, tidak Panja. Ini kalau makin murah berarti kita makin mengambil bunga yang belum berangkat Pak Jhon. Oleh karena itu saya ingin murah tapi ya Panja

Pemerintah bisa ngatur Dollarnya mungkin murah. Costnya disana mungkin murah. Terus, kenapa Saudi bisa murah? Garuda bisa mahal. Nah ini kan menjadi pemikiran kita. Itu saja.

Jadi saya ingin murah tapi bukan naik terus ... yang banyak. Tapi bisa dihitung termasuk prosedur ... kemudian mungkin dengan masih lamanya penetapan ini bisa kontrak lebih murah.

Barangkali itu saja Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Haji Bisri.

Kalau orang Pekalongan itu malah bertanya. Kalau turun itu karena apa? Tapi kalau naik justru kaget.

Yang lain?

Pak Kyai ...? Tidak ada.

Oleh karena itu menurut saya, penting sekali dipastikan Pertamina besok hadir. Yang kedua Angkasa Pura juga hadir. Karena kalau biaya. Itu masuk Angkasa Pura itu kan kaitannya dengan Airport tax sama tenaga. Tenaga dan parkir. Tenaga navigasi, parkir dan lain sebagainya.

Kemudian Pertamina kaitannya dengan Avtur. Saya punya keyakinan. Pertamina itu sudah haging Avtur pasti. Jadi kalau dia menjual mengikuti Dollar sekarang ini. Jadi untungnya terpisah. Saya punya keyakinan itu. Oleh karena itu Pertamina supaya bisa menurunkan sesuai dengan hagingnya itu. Katakanlah per barel tadi Pak Jhon bilang sekarang sudah 65 Dollar. Mungkin Pertamina sudah masuk 50-an atau 60. Saya punya keyakinan itu.

Nah demikian juga yang lain-lain. Nah nanti bisa kita bicarakan disitu sehingga. Karena ini jujur saja. Komponen yang paling meningkatkan kenaikan adalah komponen penerbangan. Yang lain-lain masih sama. Kalau persoalan BPIH-nya bagi masyarakat direct cost itu tetap seperti kemarin itu tidak ada masalah Pak Jhon. Uangnya Pak Dirjen itu banyak sekali. Dari dana optimalisasi itu banyak sekali. Kurangi berapa pun masih memungkinkan. Persoalannya kan kita selalu dilihat dihadang oleh teman-teman wartawan, oleh teman-teman LSM. Oh tahu-tahu ini tetap tapi you ambil dana dari dana indirect cost banyak sekali. Ini juga menjadi persoalan. Oleh karena itu, ini sebenarnya agak rasional. Mengambilnya tidak terlalu banyak dari direct cost. Dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dibandingkan dengan beberapa komponen yang luar biasa. Nanti yang masih ada yang bisa kita pamerkan kepada masyarakat. Misalnya *catering* yang dulu 25, sekarang menjadi 40 di Mekkah. Bis yang kemarin dipertanyakan oleh. Bis kok *upgrade*. Terus itu *upgrade*-nya apa? Tahu-tahu yang penting. Jadi dipastikan bis yang akan datang tidak boleh ada yang mogok. Dulu masih ada yang mogok. Disamping itu bisnya juga harus bis yang bagus. Kalau bisa yang bermerek, ya *mercy*-lah. Kalau ... itu kan ditengah jalan AC-nya panas. Tahu-tahu panas sendiri bis bikinan China itu. Tapi ini untuk kita semuanya. Tapi sekali lagi dipastikan *upgrade visit*. Mungkin gambarannya disitu. Kalau memang malam ini kita mandek disitu ya lebih baik dilanjutkan besok setelah ada Garuda, ada Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, ada Pertamina dan lain sebagainya. Maka dari itu secukupnya kalau bisa kita tutup saat sekarang ini.

DIRJEN PHU:

Sedikit mungkin bisa menambahkan.

Terima kasih kalau diijinkan.

Ini sebenarnya kalau BPIH itu bisa sama dengan yang kemarin. Ada catatan yang pertama selain tadi Pak Ketua Panja menyatakan bisa mengambil *indirect cost* tapi ada konsekuensinya. Sebenarnya ada peluang yang cukup bagus adalah karena makannya sudah dicover 40, itu mungkin *lifying cost*-nya dikurangi. Sehingga persis Pak sama. Kalau nanti dia beri 100 Riyal itu PP-nya tidak akan naik. Ini opsi. Tapi mudah-mudahan besok diperoleh harga yang rasionallah. Mungkin begitu. Atau mungkin bisa 1200 nanti. Itu kemungkinan yang bisa ini tidak terlalu banyak memakai *indirect cost* tetapi BPIH masih bisa dipertahankan. Itu opsi kemungkinan yang bisa kita lakukan kalau mungkin teman-teman Panja itu ingin tidak ada kenaikan yang signifikan atau sama. Kalau sama persis, ini sama persis dikurangi 500 persis sama dengan tahun kemarin. Seperti yang kita tanggal 5 Februari. Kalau ini memang 1000.

Kemudian ... 1200 mungkin. *Indirect cost*-nya naik sedikit itu tidak ada persoalan dalam konteks ini. Tapi *monggo* terserah Bapak-Bapak tapi kita tunggu. Saya lebih cenderung negosiasi dulu dengan. Negosiasi dulu supaya bisa harga yang rasional yang kita peroleh itu sangat bagus.

Saya kira itu tambahan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tapi kalau *lifying cost* itu dikurangi jangan sampai. Bukan hanya malu. Tapi jangan bilang pada Pak Sodik. Ini yang beruntung nanti Gerindra sekali. Dimanfaatkan betul oleh Gerindra nanti.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):

Ijin Pimpinan.

Kalau saya sih tetap mengacu kepada pokok permasalahan. Pokok permasalahannya apa? Pokok permasalahannya adalah BPIH. Biaya Haji itu yang menjadi pokok permasalahan. Sedangkan *lifying cost* dan lain-lain sebagai macam itu, saya melihat itu merupakan asesories dari BPIH. Nah kita mengutamakan pokoknya atau kita mengutamakan asesoriesnya. Ini mari kita kaji bersama-sama. Kalau saya sih secara pribadi, saya tetap mempertahankan pokoknya. Gaungnya adalah disitu. Berapa Haji sekarang? oh sekian, Alhamdulillah. Kalau toh asesoriesnya memang agak berkurang sedikit, 300 Riyal atau segala macam. Bisa kalau seumpamanya besok kita tidak ada jalan untuk menekan Avtur dan Bandara. Ya apa boleh buat. Ini pribadi Pimpinan. Sebab gaungnya itu adalah di pokoknya itu. Pokoknya apa? Biaya Haji itu. Kalau seumpamanya kita turunkan kembali misalnya, artinya makan yang 40 kali sudah kita putuskan, misalnya menjadi katakanlah 30 kali atau kembali kepada ... 25 kali mungkin juga tidak ada apa-apa. Asal pokoknya itu terjaga. Ini pribadi saya sampaikan. Sebab gaungnya itu adalah pokoknya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apa yang disampaikan oleh Pak John sangat rasional. Tadi dalam pengantar sudah kami sampaikan. Tolong dibicarakan sampai malam ini mungkin, antara TA dengan BPIH Pemerintah. Yang kemudian besok dibawa ke Angkasa Pura, ke ini, ke ini. Ini loh yang bisa turun ke Angkasa Pura itu, ini, ini, ini. Yang bisa turun dari Pertamina itu, ini, ini, ini. Yang bisa turun dari penerbangan itu, ini, ini, ini. Jadi kira-kira disitu. Sehingga dengan demikian kita itu negonya besok itu sudah berdasarkan pada data.

Sekali lagi hasil keputusan tadi siang, itu kita memutuskan kalau bisa turun. Kalau tidak bisa tetap. Kalau toh naik kisarannya 2,5%. 1%. Oke.

.....:

Kita jangan bicara naik dulu Ketua. Saya yakin Pak Dirjen dengan kawan-kawannya bisa mengolahlah.

Terima kasih.

.....:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya kira kegelisahan Pak John itu juga mewarnai kegelisahan saya. Tetapi juga perlu ada tingkat rasionalitas yang perlu kita carikan solusinya. Tadi opsi-opsi yang telah diberikan, pertama ... tidak naik. Sama tahun lalu naik dengan limit tertentu. Usul Pak Nur tadi, sekarang kita perkuat untuk didalami teman-teman dari Panja Pemerintah. Malam ini membuat analisis Kekuatan, kelemahan pengaruh dan lain sebagainya. Indikator-indikator berpengaruh dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, Garuda kemarin kalau mau jujur itu ada alasan penguat. Karena mereka melayani Indonesia Timur. Itu ada alat penguat. Menjadi tidak pas untuk ukuran DPR adalah karena dibandingkan dengan Saudi Arabia yang menangani wilayah barat dan sebagian tengah. Lebih dekat. Namun karena DPR juga memandang bahwa dana optimalisasi selama ini berjalan itu juga perlu dirasionalisasikan. Bahwa menutup angka yang tadi tidak naik itu juga bisa karena selama ini kan dana itu berjalan. Prinsip Pak Dirjen tadi kan nirlaba tadi kan. Kalau nirlaba yang ada pikiran ... untung. Tetapi kalau jenis usaha seperti ... untung ya masalah juga.

Nah oleh karena itu kalau menurut saya tidak perlu jawab sekarang tetapi dianalisis dengan 3 usulan DPR kemarin tidak naik. Itu dulu. Sama dengan yang pernah kita usulkan. Turun 43.000. Pernah turun. Itu juga rasional. Kemudian mungkin yang bisa kita dikurangi kalau misalnya. ... 40 kali makan, ini tidak turun. *Lifing cost* juga betul-betul juga jangan turun. Nah itu menampar Anggota DPR itu. Nah tetapi *cost-cost* yang perlu adalah *cost-cost* yang dari Pertamina, dari Angkasa Pura yang selama ini mereka menikmati juga. Ya tolonglah ini amal sholehlah kira-kira begitu.

Ya saya kira saya memperkuat Pak John sekaligus juga dari Pak Bisri tadi juga perlu rasionalitas seperti apa. Oleh karena itu besok baru bisa dijawab. Saya kira itu Pak Nur.

KETUA RAPAT:

Begitu ya. Besok baru kita lanjutkan rapat ini supaya clear semuanya. Jam 10.00. Tolong Garuda, Saudi, Pertamina, Angkasa Pura I dan II dipastikan hadir. Dan saya punya keyakinan

Setuju?

KETUA KOMISI VIII DPR RI (Dr. H. M. ALI TAHER, SH., M.Hum/F-PAN):

Pak Nur ini sudah gelisah ini. Pikirannya sudah di bandara mau ke Mesir. Jadi, oke tidak apa-apa. Nanti Pak Sodik.

KETUA RAPAT:

Saya mohon pamit dan oleh karena itu untuk sementara Pimpinan Rapat kami serahkan kepada Pak Sodik. Dr. Ir. H. D. Sodik Mudjahid, M.Sc.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-GERINDRA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Ketua Panja.
Selamat jalan. Berangkat ke Kairo.

Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan teman-teman,

Pak Dirjen, pengalaman tahun yang lalu itu Garuda. Saya ingat sekali momentnya itu. Waktu itu kami minta turun 10 Dollar, 20 Dollar Pak. Saya nanya begini Pak. Pak Dirjen Garuda, Anda keluarkan marketing atau keluarkan promosi berapa Miliar? Kadang-kadang begitu Pak. Dia mengatakan angkanya sekian Miliar. Kenapa saya tanya begitu Pak Dirjen dan teman-teman? Karena kalau Bapak bisa menurunkan harga saat itu kurang lebih 20 Dollar, sementara Anggota DPR Pak itu akan menjadi tenaga pemasaran Garuda. Kami mengatakan akan salut kepada Garuda kalau waktu itu mau turun 20 Dollar. Tapi dia tetap tidak mau Pak. Padahal Pak Dirjen, mungkin Pak Ramadhan juga sudah tahu angkanya. Pak Ramadhan silakan dihitung Pak. Dihitung angka ... per hari ini dan angka ... musim haji. Itu berapa perbandingannya? Dan Pak Ramadhan silakan Bapak punya angkanya. Angka *charter* di bulan romadhon berapa? Sebetulnya Pak Dirjen bukan harga Avtur Pak. Kalau harga Avtur menurut saya Pak, tapi adalah keinginan untuk mengambil untung yang lebih besar. Setelah dipercaya Pak dengan harga Avtur dengan alasan kenaikan tapi yang paling besar motivasinya adalah ingin mencari untungnya. Itulah sebabnya kami sempat berpikir kita harus bicara dengan BPK agar BPK memeriksa bagaimana sebetulnya keuangan Garuda dari sisi Haji ini. Sebetulnya Pak dari sisi itu kami melihat bahwa Garuda tidak mendukung misi Haji Nasional Pak. Kenapa? Karena dia mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dieksploitasi kita itu Pak. Apakah ada waktu atau tidak Pak Dirjen bicara dengan BPK? Tapi sekali lagi Pak, persoalan utama bukan harga Avturnya tapi dia ingin menjadikan misi Haji adalah project untuk mengkompensasi beberapa rute-rute yang rugi gitu loh Pak. Maka urusannya bukan negosiasi Avtur lagi tapi urusan BPK. Tapi *mangga* terserahlah, besok silakan negosiasi. Kami tahun yang lalu pernah membantu Pemerintah. Negosiasinya bukan berhadapan dengan Bapak-Bapak saja Pak. Berhadapan dengan kita. Tapi tidak mau turun. Betul tidak Pak Ramadhan. Ingat tidak ya? Karena itulah saya kira perlu ada alternative yang lain. Jika memang itu tidak bisa ditekan. Pak John begitu iya tidak.

Nah TA kami sudah membuat berbagai alternative tapi turunnya sedikit. Akomodasi Mekkah tahun lalu, berapa? 4375. Sekarang 4515. Bagaimana kalau 4400 katanya. Kemudian akomodasi Madinah, dulu 850. Bukan sistem full. Sekarang 1239. TA kami mengatakan 1200. Inilah kecil-kecil untuk mengantisipasi jika Garuda memang tidak bisa memberikan penurunan harga yang signifikan.

Pak Dirjen setelah menghitung dari angka tadi semacam ... itu berapa persen Pak kira-kira? Kalau misalnya Angkasa Pura memberikan penurunan, kira-kira berapa Dollar Pak?

DIRJEN PHU:

Itu dihalaman 9 Pak. Itu yang kemungkinan bisa dinegosiasi. Angkasa Pura itu ada 3 komponen Pak. Yang pertama, jasa kebandarudaraan. Yang kedua, jasa navigasi penerbangan. Tiga, *messenger service charge*. Itu Nomor 1 Jasa Kebandarudaraan itu kalau di ... harganya itu Rp569.827,-.

KETUA RAPAT:

Kalau point 1, 2, 3 berapa Pak?

DIRJEN PHU:

1, 2, 3 ini sekitar. Totalnya 1,2 sekian Pak. Kalau itu kita minta discount misalkan 40% kan sudah lumayan.

.....:

Sorry, maaf Pimpinan bisa menyela sedikit.

Pak Dirjen,

Tolong dirinci tentang jasa yang kebandarudaraan ini. Berapa Pak Dirjen tadi?

DIRJEN PHU:

Di kotak merah itu.

.....:

Oh 569 itu.

DIRJEN PHU:

Iya. Itu kebandarudaraan itu. Lalu yang *messenger service charge airport tax* itu di Jakarta sama di Saudi. Kalau ini bisa anu kan lumayan. Juga sama Avtur ... menurut saya.

F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLI, MM):

Pak Dirjen,

Nanti besok sekalian dirinci saja. Nah kalau uangnya sudah ada, misalnya 363.570. Ini sudah hampir 200.000 loh ini. Kan uangnya sudah disana waktu Panja kita. Sudah 3570 kan uangnya sudah ada. Nah itu kalau di BPKH harusnya Bapak yang usul. Jadi ini dihitung sudah 200.000 juga. Itu yang pertama.

Kemudian sekali lagi Pak John. Bukan beda Pak John. Memang sama tapi biar ... dari Panja Pemerintah itu biar ngirit sendiri ... tapi tidak terlalu banyak. Ya kalau naik, saya katakan apa yang disampaikan itu. Memang saya rada salah Pak. Saya kemarin di ... Pekalongan, saya sampaikan. Ya kira-kira paling banyak naiknya 1 Juta. Kalau saya sudah bilang begitu tapi kira-kira itu. Tapi Pak Jhon kan tidak itu. Oleh karena itu ada tambahan makan. Kalau itu ... 570, kemudian bisa di Avtur ulang ini saya pikir bisa naiknya 700.000.

Barangkali itu Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Diah.

Pak Mustaqim selamat datang.

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya lihatnya ini usaha minimal nih Pak Dirjen. Kalau bicaranya Avtur sama pelayanan bandara ini kan minimal karena yang tidak dibuka kan sama kita efektivitas pengelolaan, di Mekkah juga. Jadi apakah kita bicara pelayanan Haji ini. Ini kan kita

bicaranya, paradigmanya masih konsumtif. Belum bicara perubahan pengelolaan dana Haji misalnya di Mekkah itu bagaimana sih. Kita hanya nanti penginapan naik, kita naik. Avtur naik kita naik. Turun, kita turun. Ini kan masih ikuti harga pasar. Jadi kita posisinya sebagai buyer. Tapi belum membangun suatu kerjasama yang membuat kita punya akses terhadap pengelolaan dana Haji di Mekkah. Sementara kontribusi kita ke Saudi kan besar. Nah apakah kita akan mengikuti paradigm atau pola pengelolaan hanya sebagai konsumen begini atau kita bisa membangun kerjasama yang bisa membuat efisiensi atau kita mungkin bisa memperoleh benefit apabila kita membangun kerjasama di pengelolaan dana Haji. Jadi kalau begini kan kita tinggal seperti beli saja. Dan menurut saya sangat riskan menggantungkan naik turunnya pada Avtur karena sudah pasti Avtur naik-turun. Dollarnya saja sekarang kan sangat fluktuatif.

Nah terlepas dari Haji memang bagi yang mampu tapi efektivitas pengelolaan ini menurut saya tetap jadi atau pola-pola bisnis atau bagaimana yang membuat kita bisa berkontribusi terhadap. Bukan pengurangan dana tapi kontribusi kita dari kerjasama ini membuat kita tidak harus membayar seperti apabila kita bertindak sebagai konsumen. Jadi seperti biro travel saja ini. Tapi tidak kita mencoba membangun 1 terobosan-terobosan yang membuat kita bisa memperoleh dari benefit dari kerjasama yang dibangun, entah itu pengelolaan penginapan atau kesehatan, atau lain-lain. Kita mencoba inovasi-inovasi itu. Itu juga menurut saya PR. Karena kalau begini diskusinya hanya begini saja. Bagaimana membeli, ditawarkan tidak bisa. Nanti harga naik kita ikut. Kan kita sebagai konsumen.

Nah ini menurut saya yang menjadi catatan. Dan mungkin kalau tidak bisa tahun ini harus segera dipikirkan pola-pola pengelolaan atau pola-pola kerjasama baru didepan karena menurut saya Saudi kan butuh investasi ini sekarang. dan kita punya kuota dana haji yang akan kita investasikan juga. Nah pola-pola *business to business* menurut saya harus segera kita pikirkan. Karena kalau tidak begini terus ya repot juga. Nah PR itu tetap ada dengan catatan, ya kalau menurut saya Avtur ini bukan inovasi. Ini malah sangat riskan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Diah.

Pak Dirjen dan kawan-kawan di Kementerian Agama,

Mungkin beberapa kali saya katakan bahwa walaupun tahun ini tahun politik tapi kami tetap rasional. Kami sekarang makin mengetahui bahwa wartawan-wartawan media dan kaum menengah itu sudah tahu bahwa peristiwa penurunan harga itu sering dikompensasi dengan subsidi indirect yang besar. Itu kita tidak ingin terjadi karena mereka sudah makin cerdas. Itulah maka sekali lagi kita ingin lebih rasional. Dan satu diantaranya tadi yang disampaikan Bu Diah, pernah saya isyaratkan bahwa ini Pak yang harus kita ubah. Bapak silakan mencari cara lagi adalah yang tadi Pak. Itikad Garuda yang menjadikan misi Haji sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar itu adalah Bukan hanya tergantung kepada Avturnya. Silakan Bapak bicara dengan Menteri BUMN atau dengan BPK untuk bisa menekan ini.

Ada lagi Bapak/Ibu?

Pak Mustaqim?

Jadi ada usulan baru dari Kementerian Agama. Dari Panja Kementerian Agama. Yang saya hitung itu adalah 4%. 4% dari BPIH tahun yang lalu. Memang masyarakat ada yang sudah mengantisipasi 5%. Tapi ... kata Pak Jhon tadi alangkah baiknya kalau kita bisa menekan lebih besar lagi karena tidak semua orang ada kenaikan PPN 5%.

Bagaimana Bapak yang lain?

Pak Mustaqim?

Lanjut dulu. Kalau dilanjut dulu memang tadi kita sudah hampir berakhir ya. Kita akan menunggu pembicaraan Panja Pemerintah dengan Garuda, kemudian dengan Pertamina, kemudian dengan Angkasa Pura. Tapi sekali lagi saya isyaratkan. Tapi sekali lagi tahun yang lalu kita punya pengalaman seperti itu. Mudah-mudahan Direktur yang sekarang beda. Begitu harapan kita. Mungkin Direktornya beda sehingga ada visi yang berbeda didalam menempatkan visi haji dalam pencairan keuntungan dari PT Garuda.

Pak Mustaqim silakan jika ada yang mau disampaikan.

F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih kepada Pimpinan dan rekan-rekan Panja beserta Panja dari Pemerintah, dari Pak Dirjen dan seluruh jajarannya. Mohon maaf saya terlambat. Biasa Pak alasannya partai Pak. Ada ... partai dulu Pak.

Sebetulnya meskipun saya tadi sebagian belum tahu perputarannya tapi saya ingin menggarisbawahi sebetulnya 3 Pak. Pertama adalah pasca berlakunya PP yang PP itu telah berjalan. Kalau tidak salah PP 5 Tahun 2018. Ini kan ada sedikit yang menggelayut didalam benak saya antara 3 aturan yang kebetulan irisan waktunya itu hampir semuanya itu berdekatan itu Pak. Itu satu. Pertama kita tahu bahwa tanggal 11 Desember yang lalu kita telah menempatkan PPKH didalam periode transisi yang diperpanjang sampai 31 Maret. Per tanggal 12 Perpres turun, kemudian per awal 2018 PP-nya juga turun.

Pertama yang menggelayut disaya adalah terkait dengan seberapa besar kewenangan Panja Pemerintah terhadap proses peralihan keuangan atau dana Haji yang selama ini menjadi titik krusial bahwa siapa kewenangan di Tahun 2018 ini di masa transisi itu. Itu terus terang menggelayut di pemikiran saya. Khawatirnya saya adalah nyambung dengan statement tadi Pak Sodik terakhir bahwa sekalipun kita setuju mempunyai dana-dana yang termasuk didalam sisa operasional tahun-tahun akumulasi sisa operasional tahun sebelumnya tetapi didalam proses penggunaan dimasa transisi antara 3 aturan tadi itu bagaimana cara mengelaborasinya nih. Karena kalau ternyata masih punya kewenangan penuh maka sesungguhnya syukur-syukur saja. Tetapi kalau ternyata tidak mempunyai kewenangan penuh sementara kalau kita menggunakan aturan BPKH maka itu posisinya adalah dana itu sudah menjadi dana optim yang tidak bisa dipergunakan tanpa ada aturan yang mendukung untuk memback-up kekurangan dana yang muncul di alternative yang tersusun. Itu yang menggelayut di pemikiran saya. Pertama itu Pak.

Terus yang kedua, terkait dengan masalah penerbangan. Tahun lalu saya ingat sekali menjelang kita ketok palu BPIH ternyata manajemen Garuda menyampaikan masih membutuhkan minimal 4 pesawat dengan 3 kategori jenis waktu itu yaitu yang 2 kapasitas yang berbadan lebar yang jenis 747, kemudian 2 yang kategori yang sedang. Yang kategori 3330 Airbus. Nah yang terpikir oleh saya. Jangankan terpikir Avtur karena pesawatnya saja sudah pasti nyewa sehingga mata rantainya ini panjang. Sehingga hampir bisa saya sebut pasti tidak bisa berkompetisi kalau kemudian mungkin membandingkan dengan Saudi Arabia yang bisa jadi pesawatnya adalah pada posisi statusnya milik atau mungkin kalau toh dia rental mempunyai posisi *low cost* karena dia posisinya adalah mungkin berdekatan atau mungkin dalam satu kepemilikan tetapi beda pesawat. Nah maksud saya kita tidak bisa terbentur di permasalahan hanya berkuat di Avtur tetapi sesungguhnya Avtur itu hanya merupakan sebuah *pricing strategic* karena itu menjadi bagian dari unsur sesungguhnya masih ada pesawat yang dirental. Sehingga ini harus punya kepastian dulu. Artinya ini sebuah perdebatan yang mubajir kalau ternyata pesawatnya itu sendiri sebetulnya masih nyewa sehingga tidak mungkin akan harga itu turun. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga bahwa pada akhirnya muara perdebatan ini kan bagaimana harga itu paling bisa terjangkau. Di satu sisi kita sadar bahwa ada sisa dana optim diatas 3T misalnya tetapi tadi Pak Sodik menggarisbawahi ternyata wartawan juga cerdas. Ya menurut saya itu wajar karena itulah tugasnya wartawan. Tapi selama kita yakin bahwa penggunaannya itu dengan cara yang tepat dan bertanggungjawab Cuma masalahnya adalah seberapa keseimbangan itu bisa kita terapkan pada titik yang ketiga ini agar nilai yang kita putuskan di harga yang paling rasional itu juga akan menjadi pengantar di harga tahun depan khusus Tahun 2019 yang tanpa sadar sesungguhnya kalau disebut tahun politik jangan-jangan yang tahun depan. Karena 17 April itu adalah pencoblosan, BPIH itu Februari. Sehingga saya menjadi tergelayut dalam pemikiran saya sesungguhnya bukan tahun ini, jangan-jangan tahun besok sesungguhnya yang paling berat. Pada saat yang bersamaan kalau BPKH telah penuh melakukan operasionalisasinya maka permintaan anggaran untuk indirect cost itu asumsinya tidak akan mungkin sama seperti tahun sekarang. Karena tahun sekarang pun pada saat di diskusi secara informal dengan BPKH itu ada asumsi kenaikan sekitar Rp2.600.000,-. Nah hal-hal yang begini yang saya ingin utarakan dan ini sesungguhnya sudah cukup lama ingin saya sampaikan tetapi forum malam ini mudah-mudahan tepat.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mustaqim.

Jadi mungkin nanti diperkuat ya dengan Undang-Undang atau regulasi baru. Kita paham bahwa posisi Garuda yang antara lain banyak sewa itu dia berpengaruh terhadap harga. Sementara kita harus masih menggunakan Garuda. Demikian Pak pertimbangan-pertimbangan kita kedepannya dalam ... itu.

Ada lagi Bapak/Ibu?

Jadi besok kita akan memback-up Panja Pemerintah Pak Mustaqim. Kita berbicara dengan 3 komponen. Jadi maskapai, pertamina dan Angkasa Pura. Dan mohon disampaikan Pak Dirjen ke Pak Mustaqim bahwa perhitungan Pak Dirjen berapa Pak kemungkinan berhasil turun itu. Jadi di angka berapa? Mungkin Pak Mustaqim belum mendengar. Dengan negosiasi besok kira-kira kita akan mendapat berapa Pak?

DIRJEN PHU:

Ya nanti akan kita hitung ulang Pak. Setelah ini kita akan menghitung skema-skema. Ini sama, ini naik kemudian apa yang bisa kita kurangi. Mungkin begitu.

KETUA RAPAT:

Dan memberikan kata akhir. Tapi Pak Dirjen sekali lagi. Tapi untuk membangun semangat kita. Saya ingat sekali Pak. Tahun yang lalu itu. Masih ingat tidak Pak Ramadhan sama Pak ... Dirjen. Waktu itu saya minta turun 10 Dollar. Yang dengan turun 10 Dollar itu maka tidak ada kenaikan Pak. Harganya sama dengan harga tahun yang lalu. Tapi tidak berhasil. Betul tidak? Masih ingat tidak Pak Ramadhan. Maka malam ini silakan dihitung-hitung lagi sama dengan doa yang kuat sehingga besok ada penurunan yang signifikan.

Jika tidak ada Pak Ketua kami persilakan.

KETUA KOMISI VIII DPR RI (Dr. H. M. ALI TAHER, SH., M.Hum/F-PAN):

Terima kasih Pak Sodik.

Saya dari tadi merenung apa yang mau saya sampaikan terakhir ini. Karena saya dibayang-bayangi rasa bersalah. Karena dana optimalisasi kan masih maksimal masih cukup banyak. Dan itu kena akumulasi dari tabungan jamaah sejak dulu. Dan bahkan *waiting list*-nya akan. Padahal posisi kita kan nirlaba.

Pak Menteri Agama sering menekankan. Yang saya kutip dari Beliau adalah penyelenggaraan Haji ini adalah tugas nasional bukan tugas Kementerian Agama semata-mata. Kalau Kementerian Agama menjadi ... tetapi ini adalah tugas nasional. Maka mestinya Garuda menyadari betul, Pertamina menyadari betul. Inilah momentumnya untuk menyenangkan rakyat. dan juga dari situ posisi Garuda mengambil untung yang cukup besar menutupi cost-cost dia yang rugi di penerbangan-penerbangan tadi. Maka menurut pandangan saya, alasan dari Pak John tadi menjadi sangat penting untuk kita diskusikan besok untuk kita putuskan. Kalau perlu kalau Garuda tidak mau kita tahun depan tawarkan ke maskapai lain. Kalau saya ya. Kalau mau kompetitif ya. Tahun depan tidak hanya Garuda tapi kita buka penerbangan yang lain, apakah Lion, apakah Batik dan lain sebagainya termasuk juga maskapai negara-negara lain. Supaya bisa kompetitif. Nah itu kalau menurut saya. Supaya pikiran-pikiran ke rakyat ... dibelakang ini. Jangan sampai nanti yang kita paham kebetulan menjadi ketika tidak tercapai kemudian merasa bersalah terus menerus gitu loh. Yang kita mau cari kan barokahnya ini. Kalau saya tidak selamanya matematis dalam soal ini. Kalau Garuda kalau tidak mau ya kita cari ya maskapai lain. Kalau saya. Walaupun kita juga harus mendukung bahwa Garuda juga bagian dari maskapai kita. Kalau perlu ya kita tambah lagi. Saudi Arabia Airlines supaya ... dia mengangkut dia punya Avtur, harganya rendah. Misalnya begitu. Nah kalau saya melihat dari aspek itu. Kenapa Malaysia bisa turun dan signifikan? Karena ada keberpihakan. Mohon maaf malam ini agak serius ini. Karena Pak Dirjen pakai peci, jadi saya agak serius.

Jadi saya kira ini agak serius karena tolonglah ini hati nurani. Dan terima kasih ini ..., itu satu. ... ya Alhamdulillah. Ya kalau turun kan barokah juga ... daripada digunakan untuk infrastruktur yang tidak jelas ya mendingan untuk membantu rakyat kita.

Terima kasih.

Ya sudah itu saja Pak Sodik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Jadi kita akan lanjutkan besok dengan catatan bahwa alternatifnya adalah turun seperti alternative pertama. Yang kedua adalah maksimum sama dengan tahun yang lalu. Yang ketiga agak longgar sedikit yakni naiknya hanya 1%, tidak 4%.

Silakanlah dipikirkan malam ini. Bapak-Bapak sangat berpengalaman.

Cukup Bapak-Bapak?

Dengan demikian rapat saya skors.

(RAPAT DI SKORS)